

# ANALISIS KEBIJAKAN PERDA KABUPATEN PASAMAN TENTANG BACA TULIS AL-QUR'AN

(Studi Implementasi di SLTA se-Kabupaten Pasaman)

Oleh: Arif Ridha  
arif.ridha11@gmail.com

## ABSTRAK

Berangkat dari kebijakan desentralisasi pendidikan, maka Kabupaten Pasaman merasa perlu menetapkan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur kemampuan baca tulis Al-Qur'an yang tertuang dalam Perda Nomor 21 Tahun 2003. Latar belakang masalah penelitian ini berawal dari ditemukannya siswa-siswa tingkat SLTA di Kabupaten Pasaman yang masih belum bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, padahal implementasi Perda ini sudah berjalan selama sembilan tahun, ditambah keadaan masyarakat Kabupaten Pasaman yang mayoritas berpenduduk muslim.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemda Kab. Pasaman mengeluarkan Perda nomor 21 tahun 2003, menjelaskan kebijakan-kebijakan kepala SLTA se-Kabupaten Pasaman, strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan Perda, serta mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya Perda nomor 21 tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai ciri khas kualitatif, penelitian difokuskan untuk memahami kebijakan Pemda Kabupaten Pasaman tentang pandai baca tulis Al-Qur'an serta melihat implementasi Perda di SLTA se-Kabupaten Pasaman dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis kebijakan. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Perda ini di SLTA, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Kab. Pasaman mengeluarkan Perda nomor 21 tahun 2003, *pertama* untuk membumikan Al-Qur'an di Kab. Pasaman, *Kedua* untuk memacu prestasi dalam bidang MTQ, dan *ketiga* untuk menghapuskan buta tulis Al-Qur'an di Kab. Pasaman. (2) Kebijakan-kebijakan yang diambil kepala sekolah terkait dikeluarkannya Perda ini adalah: *pertama*, melaksanakan tes baca tulis Al-Qur'an sebagai syarat masuk sekolah. *Kedua*, membuat ayat-ayat Al-Qur'an semarak di dalam dan di luar lingkungan sekolah dan *ketiga* menjadikan kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagai syarat kelulusan. Sedangkan strategi yang digunakan SLTA se-Kabupaten Pasaman untuk mengimplementasikan Perda baca tulis Al-Qur'an adalah: *Pertama*, mengadakan lomba-lomba bertepatan Al-Qur'an. *Kedua*, membentuk tim safari Ramadhan bagi siswa, *Ketiga*, melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Qur'an setiap pagi. *Keempat*, membuat sistem setoran ayat dan *kelima*, mewajibkan membeli buku Iqra' bagi siswa yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Perda, yaitu faktor *internal* dan *eksternal*. Untuk itu dibutuhkan seluruh kekuatan yang ada, sehingga Perda ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Baca Tulis al-Quran**

## A. Pendahuluan

Merespon gerakan pembaharuan pendidikan nasional di daerah yang dalam hal ini diberlakukannya desentralisasi pendidikan di era otonomi, merupakan pintu masuk bagi kemandirian sekolah, maka pemerintah dengan segala konsekuensinya berupaya mencari beberapa alternatif pilihan peningkatan mutu pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan yang menjadi “*Frame of Thought*” (kerangka berpikir) pemerintah pusat dalam hal tersebut adalah Menteri Pendidikan Nasional sesungguhnya menjadi tantangan bagi daerah dan kabupaten kota, dalam meningkatkan mutu kepemimpinan dan tenaga kependidikan.

Seiring dengan pergantian kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, pada tahun 2003 ditetapkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas.

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pasal 50, 51, dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan di tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Dalam pasal 50 ayat 4 dikatakan bahwa “Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”.

Kabupaten Pasaman adalah satu dari sekian banyak kabupaten yang merasa gembira dalam melaksanakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi pendidikan. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa tahun terakhir fokus pembangunan Kabupaten ini salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Kabupaten Pasaman menganggap pendekatan yang paling strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui ranah pendidikan.

Salah satu Perda yang ada di Kabupaten Pasaman adalah *Perda Nomor 21 Tahun 2003* tentang pandai baca tulis Al-Qur’an bagi murid

sekolah dasar, siswa lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan mahasiswa serta calon pengantin.

Walaupun sudah berlangsung lama, apakah Perda ini sudah memberikan kontribusi dan manfaat bagi pendidikan di Kabupaten Pasaman? Apalagi sesuai data, masih banyak dijumpai siswa SLTA yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar. Salah satu sekolah yang penulis amati adalah SMAN yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari 774 siswa yang ada, sekitar 5% dari jumlah siswa diketahui belum bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Idealnya, bagi seorang siswa setingkat SLTA dengan rata-rata usia 17 tahun, ditambah lagi dengan kondisi budaya Kabupaten Pasaman yang mayoritas berpenduduk muslim, sudah seharusnya siswa bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, minimal mengerti dan tahu tentang susunan huruf-huruf hijaiyah. Tetapi melihat kondisi *real* yang ada, ini menjadi sebuah keadaan yang kontradiktif dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan kepala SLTA se-Kabupaten Pasaman terkait dikeluarkannya Perda Nomor 21 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah strategi SLTA se-Kabupaten Pasaman dalam mengimplementasikan Perda Nomor 21 tahun 2003 tentang baca tulis Al-Qur'an?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Perda Nomor 21 tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan kebijakan kepala sekolah terkait dikeluarkannya Perda Nomor 21 Tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

- b. Menjelaskan strategi SLTA se-Kabupaten Pasaman dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang baca tulis Al-Qur'an.
- c. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Perda Nomor 21 tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan hasil penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 tentang baca tulis Al-Qur'an yang tertuang dalam Perda Nomor 21 tahun 2003.
- b. Secara praktis dapat memberikan gambaran yang kongkrit tentang implementasi kebijakan Perda Nomor 21 tahun 2003 tentang baca tulis Al-Qur'an di SLTA se-Kabupaten Pasaman, melihat kebijakan-kebijakan kepala sekolah terkait dikeluarkannya Perda Nomor 21 tahun 2003, serta faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Perda ini di lapangan, sehingga para pembuat kebijakan dan pengelola pendidikan di pemerintah kabupaten/kota yang memiliki problem serupa dalam pelaksanaan Perda baca tulis Al-Qur'an dapat memanfaatkan hasil penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan selanjutnya.
- c. Sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sekaligus untuk dijadikan masukan kepada pihak-pihak terkait (dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman) sebagai pembuat kebijakan mengenai kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

## **D. Metodologi Penelitian**

Mengenai pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan analisis imlementasi kebijakan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 tentang Baca Tulis Al-Qur'an di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Studi deskriptif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada. Ia bisa mengenai kondisi hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, maupun efek yang terjadi. Dalam tesis ini penulis berusaha untuk menjelaskan keadaan yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta yang ada.

## 2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian, ada beberapa teknik pengambilan sampel (*sampling techniques*) yang biasa dikenal antara lain: sampling acak (*random sampling*), sampling kelompok (*cluster sampling*), sampling bertujuan (*purpose sampling*), sampling daerah atau wilayah (*area sampling*). Teknik pengambilan sampel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel wilayah (*area sampling*) yang dipadukan dengan sampling bertujuan (*purpose sampling*). Seperti yang dikatakan

Catherine Dawson, sampel purposif digunakan jika deskripsi menjadi tujuan utama, bukan generalisasi. Selain itu, sampel bertujuan digunakan karena dasar pertimbangan tertentu. Hal ini menjadi alasan kenapa penulis memakai teknik *purpose sampling*, yaitu keinginan penulis ingin melihat dan mendeskripsikan secara jelas implementasi Perda baca tulis Al-Qur'an di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

### 3. Sumber Data

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pejabat structural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, serta kepala sekolah SLTA se-Kabupaten Pasaman yang dianggap berkompeten dan berwenang dalam memberikan informasi dan data terhadap bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan dan data berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis Kabupaten Pasaman, madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Pasaman serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### b. Observasi

Adalah metode dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis hal-hal yang ada di lapangan. Penyusun melakukan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan Perda ini. Fakta yang ada kemudian menjadi bahan kajian analisis implementasi terhadap Perda baca tulis Al-Qur'an di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

c. *Interview* atau wawancara

Adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Interview dilakukan terkait masalah kebijakan-kebijakan kepala sekolah, strategi sekolah serta factor pendukung dan penghambat terlaksananya Perda baca tulis Al-Qur'an Nomor 21 tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman.

Adapun yang menjadi interviewer atau yang dijadikan subjek wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, serta Kepala SLTA yang menjadi sampel penelitian di lingkungan Kabupaten Pasaman.

## **E. Temuan**

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis Perda Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an serta Implementasinya di SLTA se-Kabupaten Pasaman, maka dapat ditegaskan bahwa Perda baca tulis Al-Qur'an ini dirasa belum efektif baik dalam proses maupun hasil pelaksanaannya di lapangan. Adanya kesimpangsiuran informasi dan keterangan yang disampaikan informan membuat data menjadi ambigu dan bercabang. Pengakuan dari pihak-pihak yang merasa melaksanakan berjalannya Perda ini ternyata tidak didukung oleh keterangan yang disampaikan pihak sekolah sebagai lembaga yang merasakan langsung efek Perda.

Kurangnya sosialisai dan pengawasan dari pihak-pihak terkait (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman) membuat Perda baca tulis Al-Qur'an ini seperti "berjalan sendiri", bahkan ada kesan dibiarkan begitu saja. Adanya euforia kebijakan Islam yang terjadi pada masa perancangan Perda ini disinyalir membuat Perda yang bernuansa Islami ini kurang digarap secara serius.

Tapi satu hal yang perlu diapresiasi adalah keinginan yang kuat dari Kabupaten Pasaman untuk membumikan Al-Qur'an di ranah Pasaman paling tidak menjadi sebuah gerakan baru perubahan daerah ke arah yang lebih baik. Persaingan khafilah MTQ antar Kabupaten membuat keinginan itu semakin besar, apalagi selama ini Kabupaten Pasaman dianggap sebagai Kabupaten yang melahirkan banyak Qori yang hebat.

Satu hal yang mesti dipermaklumkan adalah bahwa setiap keputusan dan kebijakan sudah barang tentu mempunyai kelemahan dan kekurangan, untuk itu kekurangan kecil yang melingkari pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2003 menjadi catatan penting bagi segenap pihak untuk mengupayakan sekaligus mengusahakan perbaikan dan koreksi sehingga Perda ini dapat berjalan maksimal sesuai target dan tujuannya.



## F. Kesimpulan

Dari hasil temuan-temuan penulis dalam penelitian terhadap analisis implementasi Perda Baca Tulis Al-Qur'an di SLTA se-Kabupaten Pasaman, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Kab. Pasaman mengeluarkan Perda nomor 21 tahun 2003: *Pertama* untuk membumikan Al-Qur'an di Kab. Pasaman, *Kedua* untuk memacu prestasi dalam bidang MTQ, dan *ketiga* untuk menghapuskan buta tulis Al-Qur'an di Kab. Pasaman.
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil kepala sekolah terkait dikeluarkannya Perda ini adalah: *Pertama*, melaksanakan tes baca tulis Al-Qur'an sebagai syarat masuk sekolah. *Kedua*, membuat ayat-ayat Al-Qur'an semarak di dalam dan di luar lingkungan sekolah dan *ketiga* menjadikan kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagai syarat kelulusan.
3. Sedangkan strategi yang digunakan SLTA se-Kabupaten Pasaman untuk mengimplementasikan Perda baca tulis Al-Qur'an adalah: *Pertama*, mengadakan lomba-lomba bertemakan Al-Qur'an. *Kedua*, membentuk tim safari Ramadhan bagi siswa, *Ketiga*, melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Qur'an setiap pagi. *Keempat*, membuat sistem setoran ayat dan *kelima*, mewajibkan membeli buku Iqra' bagi siswa yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an.

Terdapat faktor yang mempengaruhi kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pandai baca tulis Al-Qur'an diantaranya:

### 1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Perda baca tulis Al-Qur'an bagi siswa khususnya tingkat SLTA, terdapat berbagai faktor pendukung dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Penduduk Kabupaten Pasaman yang mayoritas Islam.

- b. Banyaknya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Kabupaten Pasaman.
- c. Tingginya kesadaran orangtua dan masyarakat akan pentingnya kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi siswa sekolah.

## 2. *Faktor Penghambat*

Faktor penghambat terlaksananya Perda baca tulis Al-Qur'an di Kabupaten Pasaman, penulis bedakan menjadi dua. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam SLTA yang bersangkutan. Faktor ini akan mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi Perda di SLTA se-Kabupaten Pasman. Adapun faktor internal itu adalah:

- a. Kurangnya ketersediaan guru sesuai dengan keahlian.
- b. Kurangnya jam matapelajaran Agama/ Al-Qur'an di SMA/SMK.
- c. Masih rendahnya motivasi dan minat sebahagian siswa akan pentingnya pelajaran Al-Qur'an.

Sedangkan faktor eksternalnya antara lain:

- a. Tidak adanya evaluasi dari Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan.
- b. Tidak adanya Peraturan Bupati, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas untuk menjalankan Perda Nomor 21 Tahun 2003.

## **G. Rekomendasi**

Mengingat penemuan-penemuan yang dihasilkan tesis ini, perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sejak awal, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2003 di SLTA se-Kabupaten Pasaman. Mulai dari kebijakan kepala SLTA sampai strategi yang digunakan dalam proses implementasi Perda. Dari berbagai hasil temuan, barangkali ada aspek

lain yang belum tersentuh. Kiranya perlu untuk diangkat sebagai topik untuk kajian selanjutnya.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan lembaga-lembaga terkait, agar membuat secara jelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Perda Nomor 21 tahun 2003 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai acuan dalam implementasi Perda di lapangan. Selain itu pembuat kebijakan juga harus melakukan evaluasi berjangka untuk melihat seperti apa realisasi kebijakan Perda di SLTA. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah bisa memberikan solusi pemecahan masalah jika memang ditemui banyak masalah di lapangan terkait pelaksanaan Perda ini di lapangan.
3. Kepada segenap pihak (stakeholder) agar ikut mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Dengan pengawasan yang baik dan terarah bukan tidak mungkin Perda baca tulis Al-Qur'an ini akan berjalan secara maksimal dan keinginan Kabupaten Pasaman untuk unggul dalam bidang MTQ bisa diwujudkan, bukan hanya di tingkat, Kabupaten, namun juga provinsi, nasional, bahkan internasional.
4. Kepada pihak sekolah juga harus pro-aktif untuk membuat Perda ini berjalan secara maksimal. Pihak sekolah tidak harus menunggu untuk dipanggil Pemerintah Daerah guna membahas Perda, tapi etika Perda ini dirasa baik untuk perkembangan sekolah, tidak ada salahnya seolah "jemput bola" agar implementasi Perda berjalan efektif.
5. Kepada siswa-siswi SLTA se-Kabupaten Pasaman yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an, hendaknya mempelajari Al-Qur'an lebih serius, bukan hanya berguna untuk kelulusan sekolah, tetapi Perda ini juga akan berlaku ketika siswa menjadi calon pengantin. Pernikahan akan ditangguhkan jika terbukti calon pengantin belum bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
6. Dilakukan penelitian-penelitian yang sama dengan metode, pendekatan, maupun perspektif yang berbeda oleh peneliti dan para pemerhati kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sebab penelitian

yang penulis lakukan merupakan upaya kecil para peneliti lainnya yang dapat dilakukan di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 1
- Arif Ridha, *Manfaat Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Terhadap Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an di SMP N 3 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat*. (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), tidak dipublikasikan.
- Ibna Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Tulis Al-Qur'an Dengan Baik Dan Benar Bagi Calon Pengantin (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Ayat (1) Dan Pasal 11 Ayat (3), *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan " Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 16
- Ridwan Phb, *Teori Kebijakan "Studi Kebijakan Publik"*, dalam <http://naifu.wordpress.com/2010/08/12/teori-kebijakan/>, diakses tanggal 04 Mei 2012 pukul 15.28 WIB
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 3
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 43
- Kamus Lengkap Psikologi (Dictionary of Psychology), J.P Chaplin, alih bahasa Dr. Kartini Kartono (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 431
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* , (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada: 2005) hlm. 191-192
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung : Tarsito : 2003)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 353.
- Matthew B. Miles, dkk., *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta : UI-Press, 1993), hlm.16.